

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENGANTISIPASI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada 14 Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)

Rusli Amrul¹⁾, Herawati Khotmi²⁾

^{1,2)}Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

E-mail: rusliamr@gmail.com

E-mail : Khotmi.2010@yahoo.co.id

Abstract,

In this research, wanted to know the role of internal control in anticipation of the tendency of the finance fraud in 14 villages in the Kecamatan Gerung of Kabupaten Lombok Barat terms of Environmental Control, Risk Control, Control Activities, Information and communication and monitoring. The research method used descriptive qualitative method. Source data from this study are primary data. Place of research conducted in several villages in the district Gerung the Village Banyu Urip, Dasan Geres, Barussalam, Dasan Tapen, Beleke, Kebun Ayu, Gapuk, Suka Makmur, Tepos, South Gerung, North Gerung, Mesanggok, Giri Tembesi and Taman Ayu. The technique of collecting data through interviews and questionnaire. The analysis technique used in this study includes various phases that start membagiakan questionnaire, collect, categorize answers, perform final scoring and classify the achievements of respondents. From research conducted inferential control environment reached 77.50%, which means achievement role in internal control, risk control reached 91.67% categorized as very instrumental in internal control, Control activities to the achievement of 59.46 categorized quite a role in internal control, information and communication have a 92.67% performance categorized as very instrumental in internal control, performance monitoring has 78.29% categorized role in internal control and together the five components has 78% outcomes, 29% is the category has a role in internal control. And suggested that there should be standards of ethics and behavior, there is an internal examiner, there is segregation of duties and responsibilities and there is a safe place to store money is to avoid financial abuse villages.

Keyword: Tendency of Insincerity Accountancy

LATAR BELAKANG

Di dalam suatu perusahaan baik pemerintah ataupun pihak perusahaan diperlukan suatu pengendalian intern. Pengendalian intern mempunyai peranan penting yaitu untuk meminimalkan terjadinya kecurangna-kecurangan yang terjadi. Menurut Dasaratha, (2008:132) Dimana Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Informasi dari laporan keuangan memiliki kualitas andal jika terlepas dari hal yang menyesatkan, kesalahan yang material dan dapat diandalkan pengguna dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar disajikan dalam suatu laporan keuangan. Untuk mengetahui kualitas andal dari suatu laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari siaran pers 12 Juni 2015 mengenai pengelolaan dana KPK telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia.

Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain; Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan

keuangan desa; Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; Formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan; serta Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih.

Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah disebabkan dari PP No. 60 tahun 2014 menjadi PP No. 22 tahun 2015. Pada Pasal 11 PP No. 60 tahun 2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten/kota cukup transparan dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel, sementara pada Pasal 11 PP No. 22 tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Sebagai ilustrasi, bila mengikuti formula PP No. 60/2014, Desa A yang memiliki 21 dusun dengan luas 7,5 km persegi ini akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 437 juta, sedangkan Desa B yang memiliki tiga dusun dan luas 1,5 km persegi mendapatkan sebesar Rp 41 juta. Namun, dengan peraturan yang baru, PP No. 22/2015, Desa A mendapatkan Rp 312 juta dan Desa B mendapatkan 263 juta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs Lombokfm.com 21 Juni 2016 Sejumlah oknum perangkat desa Lombok Barat diduga menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif saat berangkat ikut Bimtek di luar daerah pada akhir tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Bimtek perangkat desa dengan anggaran miliaran rupiah ini kini tengah diusut Polres Lombok Barat karena ada laporan dugaan penyimpangan. Polres sendiri berkoordinasi dengan Inspektorat Lombok Barat berkaitan dengan penanganan kasus. Dari data yang ada, secara umum total anggaran Bimtek di ADD (Alokasi Dana Desa) masing-masing desa mencapai Rp 21 juta tahun. Jika ditotal untuk 119 desa, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar. Sejumlah oknum perangkat desa Lombok Barat diduga menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif saat berangkat ikut Bimtek di luar daerah pada akhir tahun lalu. Sebagaimana diketahui, Bimtek perangkat desa dengan anggaran miliaran rupiah ini kini tengah diusut Polres Lombok Barat karena ada laporan dugaan penyimpangan. Polres sendiri berkoordinasi dengan Inspektorat Lombok Barat berkaitan dengan penanganan kasus. Dari data yang ada, secara umum total anggaran Bimtek di ADD (Alokasi Dana Desa) masing-masing desa mencapai Rp 21 juta tahun. Jika ditotal untuk 119 desa, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, ingin mengetahui peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa di kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dilihat dari segi Lingkungan Pengendalian, Risiko Pengendalian, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta pemantauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian

COSO telah mengeluarkan definisi pengendalian intern. Secara luas, pengendalian intern didefinisikan *as a process, effected by an entity's board of directors, mnagement and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievemnet of objectives in the following categories :*

- *Effectiveness and efficiency of operations*
- *Reliability of financial reporting and*
- *Compliance with applicable laws and regulations*

Beberapa kata kunci yang perlu mendapat perhatian dari definisi diatas yaitu :

1. Pengendalian intern difungsikan oleh orang-orang dari berbagai level organisasi. Samapai baas tertentu individu-individu mlai dari direktur samapi operator di level bawah bertanggungjawab atas berfungsinya kontrol.
2. Dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi, pengendlaian intrn hanya dapat memberikan jaminan yang wajar (*reasonable assurance*) dan bukan jaminan mutlak.

3. Pengendalian intern yang efektif akan membantu organisasi memnuhi tujuan-tujuan operasional (kinerja), pelaporan keuangan/non keuangan dan kepatuhan (Tampubolon, 2008 : 32-33)

Peranan Pengendalian Internal

Peranan Pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen telah mengakui dalam literatur profesional selama beberapa tahun. Suatu terbitan tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul Internal control menyebutkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas peranan pengendalian intern yaitu :

- Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif.
- Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
- Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien (Boynton, 2006:371).

Konsep Pengendalian Internal

Pengendalian Internal yang dimaksud oleh Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengacu pada konsep penengendalian internal menurut COSO (*Committe of sponsoring Organizations on the Treadway Commission*). Adapun Tujuan Pegendalian menurut Rai, (2008: 86-87) Meliputi (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta (3) keandalan laporan keuangan. Adapun komponen sistem pengendalian internal (SPI) sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) adalah kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organsasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, meliputi integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dn praktek sumber daya manusia.
2. Penaksiran risiko (*risk assesment*) adalah proses yang meliputi endentifikasi, analisis dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh manajemen, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam penentuan area kunci dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan, penaksiran risiko termasuk ke dalam aktivitas identifikasi risiko manajemen.
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dapat meliputi review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Sistem informasi menghasilkan laporan atas hal-hal yang terkait dengan operasional, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan.
5. Pemantauan (*monitoring*) adalah kondisi di mana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilaporkan kepada manajemen tingkat atas. Selain itu, harus dilakukan evaluasi yang independen atas sistem pengendalian internal. Frekuensi dan lingkup evaluasi bergantung pada penaksiran risiko serta efektivitas prosedur pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu studi kasus pada masing-masing desa di kecamatan Gerung. Penelitian diskriptif merupakan mendeskripsikan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau suatu daerah (Sugiyono, 2010:62).

Sumber Data

Sumber data berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung yaitu berupa wawancara secara langsung dan penyebaran kuesioner ke masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung.

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa desa dikecamatan gerung yaitu Desa Banyu Urip, Desa Dasan Geres, Desa Barussalam, Dasan Tapan, Beleke, Kebun Ayu, Gapuk, Suka Makmur, Tepos, Gerung Selatan, Gerung Utara, Mesanggok, Giri Tembesi dan Taman Ayu.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Menurut Jogiyanto (2010), wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara ditujukan kepada masing-masing bendahara desa yang ada di kecamatan Gerung.
2. Kuesioner/Angket. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan lembaran pernyataan mengenai peranan pengendalian internal di wilayah kecamatan Gerung dalam mengantisipasi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Adapun kuesioner diadopsi dari Safriyana, 2014.

Teknik Analisis

Adapun tahapan dalam penelitian ini antara lain :

1. Membagikan kuesioner kepada 14 desa yang ditujuka kepada bendahara desa / bagian keuangan desa.
2. Mengumpulkan kuesioner setelah respondon mengisi secara lengkap daftar pertanyaan tersebut.
3. Mengkategorikan jawaban dari kuesioner.
4. Melakukan penskoran terhadap jawaban dari responden. Untuk setiap jawaban akan diberikan nilai jawaban “Ya” = 1, dan “Tidak” = 0. Penskoran ini berdasarkan ketentuan dari Skala Guttman yang menyatakan bahwa Skala Guttman merupakan skala kumulatif Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu Benar (B) dan Salah (S), dapat dibuat bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk *checklist* (Riduwan, 2009:89-90).
5. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya pertanyaan.
6. Menganalisis jumlah jawaban yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah Jawaban Seluruh Responden}} \times 100$$

7. Menghitung besarnya persentase jawaban “Ya”.

Kriteria penentuan untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan akuntansi pada kecamatan gerung, peneliti menggunakan ketentuan kategorial yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:184) adalah :

Tabel 1.

Kriteria Penentuan Persentase Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Persentase (%)	Kriteria
0-19,9	Pengendalian Internal sangat sedikit berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.
20-39,9	Pengendalian Internal sedikit berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.
40-59,9	Pengendalian Internal cukup berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.
60-79,9	Pengendalian Internal berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.
80-100	Pengendalian Internal sangat berperan dalam mengantisipasi kecendrungan kecurangan akuntansi.

Sumber : Sugiyono, 2010 :184

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan ke 14 Desa yang ada di kecamatan Gerung keseluruhan tingkat pengembalian kuesioner sangat tinggi yaitu 100% kuesioner kembali. Dari hasil kuesioner yang diperoleh capaian hasilnya dapat dirincikan berikut ini :

Tabel 2.

Hasil Analisis 5 komponen Pengendalian Internal

No	Komponen Pengendalian Internal	% Capaian Peranan Pengendalian internal	Kesimpulan
1.	Lingkungan Pengendalian	77,50%	Berperan
2.	Risiko Pengendalian	91,67%	Sangat Berperan
3.	Aktivitas Pengendalian	59,46%	Cukup Berperan
4.	Informasi dan komunikasi	92,86%	Sangat Berperan
5.	Pemantauan	91,67%	Sangat Berperan
6.	Peran 5 komponen secara bersama-sama	78,29%	Berperan

Sumber : data diolah 2016

Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan tabel 2 di atas lingkungan pengendalian memiliki peranan dalam lingkup aparat desa yang ada di kecamatan Gerung tidak dalam tingkatan yang tinggi yaitu sangat berperan, hal ini disebabkan oleh tidak terdapat standar etika dan kode prilaku dan bahkan tidak terdapat tidak lanjut ataupun ingin disosialisasikan. Sebagai mana kita ketahui standar etika dan kode prilaku penting ada karena nantinya akan berpengaruh mengenai bagaimana mereka bekerja misalnya berperilaku jujur, jika melanggar etika/berprilaku tidak jujur harus ada sanksi atau tindakan yang tegas dari masing-masing desa kepada aparat desa yang berlaku tidak jujur.

Selain itu juga terdapat indikator lain yang tidak memiliki peran dari lingkungan pengendalian yaitu kepala desa tidak menetapkan target kerja yang akan dicapai, jika dilakukan target yang ditentukan oleh kepala desa dapat berpengaruh pada keberlangsungan atau aktivitas desa secara menyeluruh yaitu terciptanya suatu disiplin yang tinggi dikarenakan terdapat target kerja yang harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. selain itu tidak adanya pemeriksa internal dalam kepala desa, hal ini dapat berakibat terjadinya kecurangan dalam pelaporan/ pelaksanaan aktivitas yang dapat di masing-masing desa.

Lingkungan Risiko Pengendalian

Lingkungan resiko memiliki tingkat capaian hingga 91,67% hal ini menunjukkan lingkungan pengendalian sangat berperan. Hal tersebut didukung oleh rotasi kerja dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rutinitas yang diterapkan dan setiap terjadi transaksi dipertanggungjawabkan kepada bagian keuangan sedangkan untuk prosedur, terdapat prosedur yang ada dan tidak terdapat prosedur yang mengatur jelas mengenai penggunaan dokumen pengelolaan keuangan. Ketidakjelasan prosedur dapat menyebabkan sirkulasi kerja dalam keseluruhan desa di kecamatan gerung tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik sehingga tidak mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian memiliki tingkat capaian 59,46% hal ini menunjukkan aktivitas pengendalian cukup berperan, tidak pada tingkatan yang paling tinggi berada pada tingkatan yang paling rendah dari pada variabel yang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya indikator-indikator yang tidak mendukung seperti pekerjaan yang berbeda dilakukan oleh orang yang sama dengan kata lain adanya perangkapan tugas, tidak adanya pemisahan tugas antara yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan yang menangani lansung aktiva secara fisik dan tidak terdapat penyimpanan uang tunai yang merupakan hal yang penting dan jika disalahgunakan dapat berakibat fatal pada keuangan desa. Selain itu tidak terdapat kamera dan televisi monitor, tidak ada pemadam kebakaran yang memadai dan tidak terdapat sistem penyimpanan yang menggunakan *password*. Secara kasat mata semua aktivitas pengendalian tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya tindak kecurangan yang terjadi pada aparat desa.

Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi

Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi memiliki tingkat capaian 92,86% hal ini menunjukkan Sistem Komunikasi dan Komunikasi Akuntansi sangat berperan. Tingkatan skor 92,86 % tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Hal ini disebabkan dalam sistem dicatat sesuai dengan fakta, dicatat sesuai dengan kejadian/transaksi

dengan jumlah yang benar dan diposting serta diikhtisarkan dengan benar. Sedangkan indikator yang tidak mendukung adalah secara periodik tidak dilakukan peninjauan ulang, perbandingan dan pencocokan data oleh staf.

Pemantauan

Pemantauan memiliki tingkat capaian 91,67% hal ini menunjukkan pemantauan masuk kategori sangat berperan. Tingkat capaian yang diperoleh pemantauan setara dengan tingkat risiko pengendalian. Pemantauan memiliki sangat berperan karena didukung oleh terdapat pemeriksaan internal terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan saat bekerja dan terdapat kesesuaian catatan dan bukti pemeriksaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Lingkungan pengendalian berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
2. Penetapan resiko pengendalian sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
3. Aktivitas pengendalian cukup berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
4. Sistem informasi dan komunikasi akuntansi sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
5. Pemantauan sangat berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung.
6. Lingkungan pengendalian, Penetapan resiko pengendalian, Aktivitas pengendalian, Sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan secara bersama-sama berperan dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa pada 14 Desa di kecamatan Gerung

Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat desa setidaknya memiliki standar etika dan kode perilaku secara tertulis dan nantinya disosialisasikan kepada aparat desa.
2. Setidaknya ada tim pemeriksa internal dalam aparat desa yang independen, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecurangan yang ada di desa.
3. Sebaiknya terdapat pemisahan tugas yang jelas sehingga lebih terkoordinir dalam hal penugasan dan selain itu untuk meminimalkan terjadinya kecurangan diantara aparat desa.
4. Sebaiknya aparat desa menyediakan tempat penyimpanan uang tunai, surat-surat berharga lainnya dalam tempat yang terkunci agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan penyalahgunaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Boynton, W.C., Johnson, R.N., dan Kell, W.G, 2006. *Modern Auditing (terjemahan edisi ke-8)*. Jakarta: Erlangga.
- Dasaratha V. Rama & Frederick L. Jones, 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku 1. (Diterjemahkan Edward Tanujaya). Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2731-kpk-temukan-14-potensi-persoalan-pengelolaan-dana-desa>. diunduh tanggal 20 Juni 2016.
- <http://lombokfm.com/bimtek-perangkat-desa-lombok-barat-di-usut-polisi.html> Lombok Barat – diunduh tanggal 21 juni 2016.
- Rai, I Gusti Agung, 2008, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Robert, 2006. *Risk and Systems-Based Internal Auditing, Audit Intern Berbasis Risiko*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.